

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perempuan Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan kondisinya sebelum abad ke-19. Awal kemajuan secara nasional ditandai dengan terbentuknya organisasi pergerakan perempuan pertama yaitu Poetri Mardika pada tahun 1912 (Arivia & Subono, 2017). Sebelumnya, pada akhir abad ke-19 telah ada tokoh perempuan pelopor emansipasi wanita di Indonesia, yaitu R.A. Kartini. Melalui pemikirannya yang progresif, Kartini berupaya membebaskan perempuan dari belenggu tradisi dan norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam bidang pendidikan (Yani et al, 2022, hlm.56). Selain Kartini, sederetan tokoh perempuan turut memajukan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri (Sakola Koetamaan Istri) pada tahun 1904 (Wiriaatmadja, 1983, hlm. 94-95); dan Rohana Kudus mendirikan lembaga pendidikan Keradjinan Amai Setia pada tahun 1915 (Amini, 2021, hlm. 22-24). Perempuan progresif lainnya yaitu Sitti Zakiah, seorang perempuan Melayu-Palembang yang menyuarakan aspirasinya tentang keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Sitti Zakiah menuangkan pemikirannya melalui surat kabar Kemoedi sebagai berikut:

....Perempuan tidak boleh dilupakan karena masyarakat bisa menyaksikan kemajuan suatu negara dengan melihat kemajuan para perempuan. Kita menyekolahkan perempuan bukan sekedar untuk mendapatkan gaji saja, seperti menjadi Dokter, Klerken, dan lain-lain. Tapi seperti kata Napoleon yang saya baca di bukunya, bahwa perempuan dididik menjadi ibu yang kelak akan mendidik dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya (Surat Kabar Kemoedi edisi bulan Juli tahun 1926, Koleksi Perpustakaan Nasional, Indonesia).

Kemajuan perempuan terus dirasakan pada periode selanjutnya. Pada awal kemerdekaan tahun 1946, Maria Ulfah menjadi menteri perempuan pertama di Indonesia (Tangkilisan, 2022). Pada tahun 2024, 13 perempuan menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Puncak kemajuan perempuan ditandai dengan naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di

Indonesia (2001–2004). Kemajuan perempuan juga terjadi melalui regulasi responsif gender yang dilandasi UUD 1945 pasal 27 dan 28 A-J mengenai persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (*equal right, non discrimination*). Regulasi selanjutnya diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Melalui PUG, perempuan dan laki-laki dapat menjalankan, mempertimbangkan beban perempuan dalam sisi reproduksi, produksi, dan sosial (Santoso, 2016, hlm. 53). Regulasi PUG berimplikasi pada ditetapkannya Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam aspek pendidikan. Aspek tersebut dapat diukur dari keterlibatan perempuan dalam perangkat kelas dan proses pembelajaran; kurikulum dan materi pembelajaran tidak mengandung diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan representasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2008).

Kemajuan perempuan di bidang politik ditandai peningkatan keterwakilan perempuan di DPR sebanyak 30% berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008. Kemajuan perempuan di bidang ketenagakerjaan ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada fase seribu hari pertama kehidupan. Pasal 4 ayat 3 menguraikan bahwa ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan wajib selama tiga bulan dan tetap menerima upah. Pada tingkat provinsi dan kota, dukungan terhadap kesetaraan gender dibuktikan dengan diperolahnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh kota Palembang pada tahun 2020. Penghargaan ini juga diterima oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (<https://sriwijayamedia.com/2021/09/pemkot-palembang-raih-ape-ri-2020-dari-menteri-pppa>, diakses 20 September 2024).

Kini, apakah berbagai kemajuan tersebut menandakan persoalan perempuan telah selesai?. Sejarah menggambarkan bahwa perempuan menghadapi berbagai tantangan setiap zaman. Pada tahun 1870, ketika UU Agraria diberlakukan untuk membuka penyewa tanah bagi orang Eropa maka sejak saat itu terjadi konglomerasi. Dibalik kejayaan produksi karet Deli dan kualitasnya yang mendunia, ada ribuan perempuan yang didatangkan pemerintah kolonial

Belanda dari Jawa untuk melayani seksual laki-laki yang bekerja di perkebunan tersebut. Keputusan tersebut bertujuan untuk mempertahankan produktivitas para kuli agar tidak merosot (Toer, 2009, hlm. 296-297). Para pemilik modal juga didorong untuk hidup bersama nyai atau gundik agar mereka merasa betah. Bagi para tentara, keberadaan nyai dianggap sebagai rahmat karena menjauhkannya dari pelacur dan mengurangi resiko tertular penyakit kelamin (Hellwig, 2007, hlm. 41-44). Namun bagi nyai, kondisi tersebut menimbulkan petaka sebagaimana yang direpresentasikan dalam tokoh Nyai Otosoroh. Ia tidak memiliki hak asuh atas anaknya yang merupakan hasil dari pernikahannya dengan seorang Belanda karena pernikahannya tidak diakui oleh pemerintah kolonial (Toer, 2008; Supriatna, 2018, hlm. 157).

Eksplorasi terhadap perempuan juga terjadi pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan pemerintahan kekaisaran Jepang melalui *Koshō Sedo* menjadi landasan bagi praktik *jugun ianfu* (Suliyati, 2018). Pemerintah Jepang menganggap *jugun ianfu* sebagai suatu sistem yang mencerminkan tindakan patriotik dan terhormat. Namun kenyataannya, para perempuan menjadi korban dari filosofi yang tampak mulia tetapi sebenarnya menyembunyikan kekejaman. Perempuan Indonesia dibuat rela mengorbankan jiwa dan raga mereka dalam sistem *jugun ianfu* (Savitri, 2010, hlm. 284-295). Perempuan dalam posisi itu menjadi *subaltern* yaitu kelompok yang tidak bisa ‘berbicara’ dalam sistem kekuasaan (Spivak, 1994).

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, negara mengonstruksi perempuan untuk memperkuat legitimasi melalui ideologi Ibuisme Negara. Negara memobilisasi dan mengatur perempuan melalui organisasi Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Fatimah, 2021, hlm. 183-184; Suryakusuma, 2021, hlm. 39). Negara mengonstruksi perempuan yang ideal yaitu ibu rumah tangga yang patuh dan bertanggung jawab pada keluarga, mendukung karir suami (Ida, 2021) dan membatasi karirnya agar tidak melebihi suami (Syamsurijal, 2022, hlm. 22). Negara juga memanfaatkan perempuan dalam mengontrol populasi masyarakat Indonesia melalui program Keluarga Berencana (KB) (Udasmoro, 2004, hlm. 150; Dewi & Kasuma, 2014, hlm. 169). Perempuan

menjadi sasaran KB karena dipandang sebagai pihak yang paling utama bertanggung jawab atas pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga.

Perempuan semakin problematik ditengah arus kapitalisme global. Kapitalisme merenggut harga diri perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai komoditi mulai dari industri kecantikan hingga produk laki-laki. Perempuan dimanfaatkan sebagai mesin penarik perhatian melalui wajah dan tubuhnya. Kapitalisme global melihat penampilan perempuan lebih laku untuk konsumen publik sehingga berhasil membentuk standar kecantikan perempuan yang digambarkan dengan sangat eurosentrism. Perempuan dianggap cantik jika memiliki tubuh ideal, berkulit putih dan cerah, berpenampilan menarik serta mengikuti *trend* (Hamer et al., 2021, hlm. 22). Standar kecantikan itu terus-menerus dikomunikasikan melalui film, televisi, sastra, majalah, dan media lainnya sehingga membentuk kebenaran yang diterima secara sosial (*post-truth*) (Jandrić, 2018; Modreanu, 2017). Akibatnya, persepsi tentang kecantikan menjadi homogen dan membatasi serta mempengaruhi bagaimana individu, terutama perempuan, melihat diri mereka sendiri dan orang lain (Defino, 2020). Standar tersebut menciptakan tekanan untuk memenuhi ekspektasi tertentu yang sering kali tidak realistik, sehingga berpotensi menyebabkan masalah citra terhadap tubuh perempuan.

Persoalan kesetaraan gender menjadi alasan PPB menetapkan isu *Gender Equality* (Kesetaraan Gender) sebagai salah satu tujuan dalam kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dengan memberi kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing (World Bank, 2011). Salah satu isu yang dibahas dalam *Gender Equality* yaitu kekerasan gender yang masih terus terjadi ditengah pesatnya teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi merupakan anugerah namun di sisi lain menciptakan bentuk kekerasan baru yaitu kekerasan gender berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). UNESCO melaporkan bahwa AI seperti Chat GPT sering disalahgunakan untuk melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan. Salah satu laporan menunjukkan *chatbot* AI memberikan tanggapan yang merendahkan perempuan yaitu: *your opinion doesn't matter, anyway* (yang

berarti “pendapat mu tidak penting”). Laporan lainnya menunjukkan bahwa sebesar 58% orang di seluruh dunia telah mengalami pelecehan secara *online* di platform media sosial (Chowdhury & Lakhsmi, 2023, hlm. 10). Bentuk pelecehan berupa ancaman, perundungan, serta serangan verbal yang sering kali ditujukan untuk mengintimidasi atau merendahkan perempuan (Schiffrin et al, 2021, hlm 1993).

Data dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 79,9% perempuan menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami dari data tersebut yaitu kekerasan seksual (9.087), fisik (6.909), dan psikis (5.916). Berdasarkan tempat kejadian, kasus kekerasan banyak terjadi di rumah tangga (12.142), fasilitas umum (2.049), dan sekolah (1.113) (SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 17 Agustus 2024). Mengenai kekerasan yang terjadi di sekolah, data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan sebanyak 31% siswi SMA mengalami kekerasan. Melalui data BPS diketahui bahwa sebanyak 6,06% (2022) dan 5,68% (2023) siswa perempuan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara itu, siswa perempuan yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sebesar 20,35% (2022) dan 19,34% (2023) ([bps.go.id](http://bps.go.id), diakses 20 Januari 2024). Dari segi kuantitas, memang terlihat adanya penurunan angka siswi yang tidak melanjutkan sekolah. Namun, siswa perempuan yang tidak melanjutkan sekolah juga perlu diperhatikan karena persentasinya masih cukup tinggi. Siswa perempuan masih menghadapi tantangan seperti pernikahan dini (Amini, 56, hlm. 2016), faktor ekonomi dan agama (Desliana et al, 2021, hlm. 25) serta budaya (Mahdi, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih perlu terus diupayakan. Kemajuan yang tampak di tingkat elit atau struktural tidak selalu mencerminkan kondisi yang dialami perempuan di tingkat akar rumput. Aspek yang paling mendasar penyebab ketidaksetaraan gender tersebut adalah patriarki (Natasha, 2013). Nilai-nilai patriarki masih tercermin dalam pandangan keseharian masyarakat seperti “perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi karena akhirnya ke dapur juga” atau “seorang gadis harus cepat menikah agar tidak menjadi tua” (Setiawan, 2025, hlm. 35; Fitrianti & Habibullah, 2017, hlm. 95).

Perspektif ini juga mengonstruksi bahwa ketidaksetaraan gender identik dengan pekerjaan tradisional (domestik) seperti urusan dapur yang dipandang rendah.

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan representasi dan konstruksi perempuan yang tidak adil dalam pendidikan sejarah. Buku teks Sejarah merepresentasikan perempuan sebagai pelengkap dan memberikan informasi yang minim mengenai perempuan. Ketika perempuan tampil sebagai pejuang, ia diidentikkan sebagai laki-laki yang kuat secara fisik dan psikis (Kurniawan, 2023, hlm. 239). Misalnya, tokoh perempuan Aceh Malahayati digambarkan dalam buku teks Sejarah Kurikulum Merdeka sebagai laksamana laut perempuan pertama yang diakui dunia sekaligus sebagai tokoh yang mampu mengalahkan Cornelis de Houtman dengan *rencong* (Safitry et al., 2021, hlm. 15). Representasi tersebut memang tidak terlepas dari kepentingan pendidikan nasional, sehingga pendidikan sejarah kerap diarahkan untuk membangun nasionalisme yang identik dengan sifat maskulinitas (Nagel, 1998). Namun, teorisasi yang mereproduksi ideologi nasionalis sering kali tidak menghadirkan narasi perempuan secara proporsional (Silva, 2020; Walby, 2000; Yuval-Davis, 1993).

Perempuan juga mengalami marginalisasi dalam historiografi Indonesia (Purwanto, 2006, hlm. 35; Burke, 2015, hlm. 73). Nama perempuan seringkali dikaitkan atau diikuti nama laki-laki seperti nama suami, putra, atau koresponden laki-laki dari perempuan tersebut (Moniz, 2022). Kondisi perempuan yang tidak bisa lepas dari dominasi laki-laki tersebut, menggambarkan *klien* (perempuan) dan *patron* (laki-laki) (Kuntowijoyo, 2003, hlm 115). Meskipun ada penulisan sejarah perempuan, yang lebih sering ditulis adalah tokoh-tokoh besar, sedangkan *ordinary people* cenderung terpinggirkan dalam tradisi historiografi Indonesia (Amini, 2018, hlm. 156). *Ordinary people* dalam hal ini merujuk pada perempuan yang menjalankan peran tradisional. Tidak masuknya peran tradisional perempuan dalam historiografi disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan sebagai ibu, istri, dan pelayan tidak relevan dengan sejarah (Rose dalam Pamuk & Muç, 2021).

Dominasi representasi perempuan yang bersifat maskulin tersebut turut dipengaruhi pula oleh wacana feminism. Feminisme merupakan ideologi atau gerakan sosial perempuan Barat yang bertujuan mengubah subordinasi perempuan (Ferre, 2006). Perjuangan ini diawali dengan tuntutan perempuan terhadap

kesetaraan hak dalam politik. Dalam periode selanjutnya, gagasan feminism semakin kompleks. Feminisme memandang kodrat perempuan (menstruasi, hamil, dan menyusui) sebagai akar masalah ketidaksetaraan gender (De Beauvoir, 2016). Begitu pula pandangan mengenai perempuan yang menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Friedan (1963) menguraikan bahwa sebenarnya ibu rumah tangga mengalami suatu perasaan yang sulit dijelaskan (*mystique*). Sementara itu Allen (1983, hlm. 315) lebih *blak-blakan* menegaskan bahwa *motherhood is dangerous to women* karena membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan diri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa feminism Barat atau *mainstream feminism* (O'Reilly, 2019) skeptis terhadap peran perempuan dalam keluarga. Itulah sebabnya gagasan feminism ditentang karena dianggap radikal, gerakan perempuan yang membenci laki-laki, mendukung seks bebas dan LGBTQ+ (Prabasmoro, 2006, hlm. 19) yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia (Santoso, 2022, hlm. 18)

Jauh sebelum feminism, Islam lebih dulu revolusioner memperhatikan perempuan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan perempuan menjadi lebih manusiawi dibandingkan pada masa jahiliyah. Islam mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif serta misoginis yang terjadi pada masa pra Islam (Muhammad, 2019, hlm. 68). Islam mengubah praktik jahiliyah terhadap perempuan Arab menjadi lebih adil dan bermartabat seperti melarang membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan, hak mendapatkan warisan, batasan poligami, dan hak mendapatkan pendidikan (Marwing & Yunis, 2021, hlm. 166-169). Tradisi filsafat Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia dan setara dengan laki-laki, yakni sebagai hamba dan wakil Allah SWT atau pemimpin di bumi tanpa membedakan gender, etnis, dan warna kulit (Saiful et al., 2020, hlm. 197). Perhatian Islam terhadap perempuan direpresentasikan melalui pembahasan khusus mengenai perempuan dalam beberapa surah Al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa, Surah Maryam, Surah Al-Mujadilah, Surah Al-Mumtahanah dan Surah At-Thalaq. Islam menempatkan tanggung jawab pengasuhan pada ibu karena ibu memiliki kemampuan menjaga dan memperhatikan kesehatan dan gizi anak (Khalid, 2017, hlm. 133). Tanggung jawab ini juga diberikan kepada ayah, sebagaimana tergambar melalui sosok

Luqman dalam Q.S. Luqman, yang menasihati anaknya dengan lembut menggunakan panggilan *yaa bunayya* yang berarti *wahai anakku tersayang* (Assolich, 2023).

Wacana feminism di satu sisi memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang setara dengan laki-laki (maskulin). Namun, di sisi lain menimbulkan marjinalisasi terhadap perempuan yang melakukan peran tradisional. Pengalaman historis di Indonesia menunjukkan gambaran berbeda sebagaimana wacana feminism tersebut. Pada masa perang kemerdekaan, ibu-ibu terlibat dalam perang sambil tetap mengurus anak-anak. Bahkan ada yang melakukannya dalam keadaan hamil, sehingga mereka mengambil peran yang selaras dengan kondisi “kodrat” perempuan. Ada pula perempuan yang bertugas sebagai kurir, sebuah peran yang dianggap lebih *luwes* dijalankan perempuan karena kemampuannya menyamar sebagai ibu rumah tangga yang tidak menimbulkan kecurigaan pihak Jepang (Rahayu, 2016, hlm. 103). Aktivitas perempuan yang menyesuaikan dengan kodratnya tersebut ternyata memiliki kontribusi penting bagi perjuangan kemerdekaan.

Keyakinan bahwa pengalaman perempuan perlu dilihat dari berbagai perspektif sudah selayaknya menjadi perhatian sebagaimana amanat undang-undang melalui kebijakan PUG dalam bidang pendidikan. Dibandingkan bidang lain, pendidikan sejarah memiliki ruang yang lebih luas merepresentasikan perempuan. Siswa akan memperoleh pemahaman sejarah yang bisa digunakan untuk memahami dan menjelaskan perkembangan dan perubahan masyarakat (Isjoni, 2007, hlm. 71; Hasan, 1998, hlm. 113). Pendidikan sejarah sebagai alat produksi memori kolektif masyarakat (Utami, 2021, hlm. 81) juga dapat memberikan konstruksi yang adil terhadap perempuan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena perempuan merupakan indikator kemajuan atau kemunduran bangsa (Sukarno, 1963, hlm. 17). Perempuan berperan sebagai simbol ideal yang memperkuat bangsa sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan perempuan tidak bisa diabaikan meskipun terdapat berbagai stigma yang melekat (Nuryanti & Akob, 2019, hlm. 24). Hal yang tak kalah penting, jika perempuan tidak ada dalam sejarah maka siswa perempuan menganggap diri mereka tidak berharga (*inferior*) (Mills, 1994, hlm. 6).

Untuk mengonstruksi bahwa peran tradisional sama pentingnya atau *equal* dengan peran profesional, maka perlu pendekatan baru yaitu feminism posmodern. Feminisme posmodern bermaksud mengkritisi narasi besar feminism Barat dengan memberikan pembelaan kepada *the Other* (Derrida dalam Sallis, 1987). *The Other* atau *ordinary people* dalam hal ini merujuk pada perempuan yang melakukan peran tradisional. Dekonstruksi yang dilakukan feminism posmodern tidak bermaksud menolak gagasan feminism Barat tetapi justru memperkaya dan memperluas paradigma kesetaraan gender. Posmodernisme lebih cenderung menerima perbedaan (*difference*) (Lubis, 2016, hlm. 15), sehingga baik peran tradisional maupun profesional dipandang sebagai bentuk emansipasi perempuan. Melalui konsep ini perempuan dapat merefleksikan feminism sesuai dengan pengalaman serta pilihan hidupnya (Tong, 1998, hlm. 284). Sebagaimana pengalaman perempuan Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi banyak faktor seperti etnis, kelas, tempat tinggal, dan sejarah (Niehof, 2023, hlm. 267).

Melalui feminism posmodern nilai-nilai feminism yang telah disepakati tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, melainkan dapat digugat untuk membangun pemahaman baru (Arivia, 2003, hlm. 141). Konsep feminism posmodern sejalan dengan gagasan feminism poskolonial, yang muncul sebagai respons terhadap feminism Barat yang tidak selalu relevan dengan kondisi negara-negara poskolonial (Trinh, 2007; Gandhi, 2001; Spivak, 1994). Jika selama ini feminism Barat hanya menyoroti perempuan yang berkegiatan di ruang publik, maka feminism posmodern juga mengarahkan perhatian pada perempuan yang memiliki pengalaman menjalankan peran tradisional. Pendekatan ini akan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan mendukung kehidupan perempuan (O'Reilly, 2019).

Peran kodrat perempuan, seperti ibu menyusui, dalam pandangan Perrot (1992) merupakan proses mentransfer ingatan historis, pengalaman, emosi, dan makna sosial-budaya dari ibu kepada anaknya. Menyusui merupakan proses menulis sejarah menggunakan “tinta putih” (*white ink*) berupa ASI yang kaya nutrisi (Cixous, 1975). Menyusui juga merupakan *an ancient art and a modern miracle*, yaitu praktik yang telah dilakukan selama ribuan tahun namun baru sepenuhnya dihargai oleh ilmu pengetahuan modern karena manfaatnya yang luar

biasa bagi ibu dan anak (Prentice, 2022). ASI mengandung komponen bioaktif untuk antibodi (Reniker et al., 2023) serta mendukung perkembangan otak anak (Khotimah et al., 2024). Laktasi meningkatkan kepercayaan diri ibu dan memperkuat ikatan emosional dengan anak (Modak et al., 2023). Penelitian historis menunjukkan bahwa menyusui pada perempuan Jawa dan Sumatra pada masa kolonial dianggap sebagai praktik kesehatan yang penting (*healthy progress*), berbeda dengan susu botol yang dipromosikan oleh pihak kolonial sebagai simbol modernitas (Formichi, 2022). Mengenai posisi perempuan dalam rumah tangga, hal ini juga pernah digagas oleh Nyi Sri Mengoensarkoro, seorang tokoh dari organisasi Wanita Tamansiswa. Ia menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam rumah tangga (Ningrum, 2018, hlm. 197).

Peran tradisional seperti memasak dalam pandangan feminism posmodern, tidak dipahami sebagai marjinalisasi melainkan sebagai pilihan peran yang setara dengan peran perempuan di ranah publik. Tokoh perempuan dalam sejarah Indonesia memiliki kegemaran memasak seperti Kartini yang menguasai berbagai resep dari tradisi kuliner Jawa, Cina, Arab, dan Belanda (Ganie, 2005; Tim Penyusun PDAT, 2024, hlm. 41-42). Selama masa revolusi fisik di Yogyakarta saat bahan makanan terbatas, ibu-ibu berstrategi mengolah singkong menjadi berbagai jenis makanan, seperti *tiwul* yang dicampur dengan kelapa, singkong rebus dengan lauk sayur *gori* (nangka muda) atau sayur pepaya. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan hingga siap disajikan, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikannya kepada para tentara yang berjuang di medan perang (Ningsih, 2024, hlm. 39).

Aktivitas memasak bukan sekadar tugas domestik tetapi juga praktik perawatan dan kepedulian yang memiliki nilai penting bagi keluarga. Kajian Diamond (2012, hlm. 448) menjelaskan bahwa masyarakat tradisional, seperti di Papua memiliki pola makan rendah garam dan gula karena mengonsumsi makanan yang mereka olah sendiri dari sumber tanaman lokal. Pangan lokal, selain kaya gizi, umumnya minim olahan dan lebih sehat, sehingga sejalan dengan prinsip *real food* yang menekankan makanan alami, utuh, dan bergizi. Di Indonesia, contoh pangan lokal yang menyehatkan meliputi pempek (Wargadalem et al., 2023) dan pindang dari Palembang yang berbahan dasar ikan (Sudargo et

al., 2022); *lalaban* (Darwis, 2022; Rahman, 2018) dan tahu Sumedang (Harahap, 2017) khas masyarakat Sunda; serta berbagai olahan tradisional lain yang mempertahankan nilai gizi alami bahan baku. Pola konsumsi ini tidak hanya keberlanjutkan budaya kuliner tetapi juga mendukung ketahanan pangan kesehatan keluarga (FAO, 2022; Aggarwal, 2025).

Makanan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi penanda identitas (Wargadalem, 2021). Soekarno menekankan pentingnya panganan lokal sebagai identitas nasional, misalnya beragam kue berbahan lokal seperti ubi, singkong, tepung beras, tepung ketan, dan jagung (Adams, 1966; Rahman, 2016a; Rahman, 2018b). Pandangan ini sejalan dengan ungkapan Jean Anthelme Brillat-Savarin yang menegaskan bahwa makanan tidak hanya mencerminkan kebutuhan biologis manusia, tetapi juga identitas budaya, sosial, dan bahkan ideologinya (Parker, 1995). Maka dari itu, feminism posmodern membangun pemikiran bahwa perempuan yang menjalankan peran tradisional itu, setara (*equal*) dengan perempuan profesional. Melalui pendekatan ini, perempuan sedang menuliskan pengetahuan perempuan berdasarkan pengalamannya (*writing woman*) (Trinh, 2007). Penulisan sejarah dari perspektif perempuan menjadi upaya untuk merebut kembali subjektivitas dan makna diri, sebagaimana pandangan Cixous (1976) bahwa perempuan perlu menulis dirinya sendiri agar terbebas dari narasi androsentrism.

Untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran sejarah maka menggunakan *feminist pedagogy*. Pedagogi feminis tidak hanya terwujud melalui relasi kelas tetapi memberikan ruang dalam mengembangkan materi pembelajaran sejarah dengan memberikan pengalaman peran tradisional sebagai gerakan feminism. Pedagogi feminis lahir dari tradisi pemikiran kritis (*critical theory*) (Hoffmann & Stake, 1998, hlm. 79-97) yang diadaptasi untuk mengkritisi pendidikan yang androsentrism (*male-centered*). Secara sederhana, pedagogi feminis adalah sebuah paradigma feminis dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Briskin, 1990, hlm. 1; Shrewsbury, 1987, hlm. 6). Pedagogi feminis berpandangan bahwa guru bukanlah pusat segalanya ataupun pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan (Webb et al., 2002, hlm. 68). Hubungan guru dan siswa bukan bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik antara manajer-

buruh, tetapi bersifat horizontal dan egalitarian. Guru dan siswa merupakan subyek yang sama-sama belajar (Nuryatno, 2011, hlm. 7).

Melalui pedagogi feminis ruang belajar akan lebih aman, inklusif dan bebas diskriminasi (Cerenado & Quimbo, 2022). Pendekatan ini juga akan membangun kesadaran kritis, menghargai kontribusi perempuan sekaligus memahami permasalahan kontekstual yang dialami perempuan. Untuk implementasinya diterapkan oleh guru yang memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai peran tersebut. Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa pengalaman manusia merupakan ekspresi kesadaran yang terbentuk dari pengalaman personal, lingkungan sosial, dan budaya (Husserl, 1960; Rorong, 2020, hlm. 18). Kesadaran gender mendorong guru Sejarah untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam pembelajaran sejarah. Representasi ini diperoleh dari guru Sejarah yang mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan melalui program Guru Penggerak. Meskipun program ini secara administratif telah dihentikan pada tanggal 18 Maret 2025 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 14/M/2025, program ini tetap memiliki relevansi akademik karena menjadi bagian dari perkembangan sejarah pendidikan Indonesia.

Guru Penggerak merupakan program yang dikembangkan pada Kurikulum Merdeka. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Program Guru Penggerak (PGP) merupakan bagian dari pengembangan profesi guru (*Teacher Professional Development/TPD*) yang memberikan bekal keahlian kepemimpinan pembelajaran. Melalui PGP guru diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam ataupun di luar satuan pendidikan sehingga berpotensi menjadi pemimpin pendidikan (Sodik et al., 2021, hlm. 138); *coach* atau *role model* bagi guru lain; berperan aktif dalam Kelompok Kerja Guru (KKG); mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan siswa (Lubis et al. 2023, hlm. 78-79).

Untuk menjadi Guru Penggerak, guru Sejarah memerlukan kesadaran dan komitmen. Proses ini bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan perjuangan mulai dari seleksi, pendampingan selama waktu tertentu,

melewati proses penilaian hingga akhirnya dinyatakan lulus. Seluruh rangkaian ini dijalani sambil tetap mengajar di sekolah (*on-the-job training*). Di samping memenuhi peran profesionalnya, guru Sejarah memberdayakan dirinya dalam ranah keluarga dengan melakukan aktivitas seperti menyiapkan bekal makanan sehat (*real food*), menyusui, memperhatikan pendidikan anak dan menjalankan tugas rumah tangga sebagai wujud dari kesadaran historis, serta kesetaraan gender. Pengalaman inilah yang kemudian ‘dibawa’ oleh Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah untuk diimplementasikan dalam pembelajaran Sejarah. Hal ini menandakan Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah memiliki sikap kritis dan transformatif dalam mengajar sejarah perempuan (Apaolaza-Llorente et al., 2023, hlm. 1), yang dipengaruhi oleh pengalamannya (Stevens, 2018, hlm. 7).

Melalui pengalamannya tersebut Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah menerapkan prinsip-prinsip pedagogi feminis. Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah telah mendekonstruksi makna perempuan melalui pengalamannya sehingga menciptakan pembelajaran Sejarah kreatif (Supriatna & Maulidah, 2020). Menurut Maurice Merlau Ponty (Bertens, 2013) pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari pengalamannya. Artinya, pengetahuan yang diperoleh siswa dalam pembelajaran Sejarah merupakan hasil dari belajar bersama guru Sejarah yang reflektif dan kritis sehingga menumbuhkan rasa percaya diri (*self confidence*).

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti pengalaman perempuan dalam masyarakat dan mengakui peran tradisional perempuan yang sejalan dengan pandangan feminism posmodern (Thomas-Tse, 2025; Ginting-Carlström, 2024; Urbach et al., 2023; Bai, 2022; Miseres, 2022; Deb, 2022). Penelitian mengenai pendekatan feminis dalam pembelajaran juga telah banyak dikaji dalam berbagai bidang studi (Marie-Monique Schaper, 2024; Apaolaza-Llorente et al., 2023; Sheehy, 2022; Cerenado & Quimbo, 2022; Cannizzo, 2021; Steele, 2021; Bowman, 2020; Malichah et al., 2019; Chaerunnisa, 2017). Namun kajian dengan pendekatan feminis dalam pembelajaran Sejarah masih terbatas pada analisis wacana (Sari & Andi, 2024; Kurniawan, 2023; Diana, 2022) dan sejarah perempuan sebagai materi dalam pembelajaran Sejarah (Ali & Hudaiddah, 2023; Bella & Subekti, 2023; (Fitriani, 2022). Penelitian yang secara khusus menelaah

implementasi pedagogi feminis oleh Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah masih sangat terbatas. Belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan pengalaman peran tradisional perempuan dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada implementasi pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah yang dilakukan oleh Guru Penggerak perempuan di SMA Kota Palembang. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dimana pedagogi feminis tidak hanya berkaitan dengan relasi di kelas tetapi juga pengembangan materi pembelajaran Sejarah dengan pendekatan feminism posmodern sebagai bagian integral dari praktik pedagogi feminis. Pengakuan terhadap pengalaman menjalankan peran tradisional merupakan suatu pengetahuan dan tindakan reflektif yang memiliki nilai setara dengan peran profesional. Posisi ini memperluas pemahaman tentang feminism yang selama ini cenderung berorientasi pada konteks Barat atau dikonstruksi narasi androsentris dan mengabaikan makna peran tradisional dalam pengalaman perempuan Indonesia. Kajian ini penting untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pengalaman Guru Penggerak perempuan mata pelajaran Sejarah mendekonstruksi pembelajaran Sejarah menjadi lebih kontekstual, inklusif dan bermanfaat untuk masa depan (Hasan, 2012; Supriatna, 2007).

Atas dasar itu, maka penelitian disertasi ini akan menjabarkan dan mendalami bagaimana guru Sejarah mengimplementasikan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah melalui pengalamannya sebagai Guru Penggerak. Untuk mencapai uraian yang komprehensif mengenai hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Analisis fenomenologi dilakukan kepada guru perempuan mata pelajaran Sejarah SMA di Kota Palembang yang telah mengikuti program Guru Penggerak. Hasil analisis pemaknaan perempuan melalui pengalaman guru Sejarah sebagai Guru Penggerak, dilanjutkan dengan menguraikan pengalamannya mengimplementasikan pedagogi feminis dan tantangannya dalam pembelajaran Sejarah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan pedagogi feminis dan pengembangan teori pendidikan Sejarah yang inklusif mengenai peran perempuan dalam pembelajaran Sejarah di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana pengalaman Guru Penggerak menerapkan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah SMA di Kota Palembang?.” Secara khusus, permasalahan penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana guru Sejarah memberikan makna terhadap perempuan melalui pengalaman sebagai Guru Penggerak?
- 2) Bagaimana implementasi pedagogi feminis dari pengalaman Guru Penggerak Sejarah perempuan dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang?
- 3) Bagaimana tantangan implemenatai pedagogi feminis dari pengalaman Guru Penggerak perempuan dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan mengonstruksi pengalaman Guru Penggerak perempuan dalam menerapkan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengeksplorasi makna perempuan melalui pengalaman Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang. Guru Penggerak merupakan bagian dari program Kurikulum Merdeka yang bertujuan mengembangkan keterampilan profesional. Guru Sejarah yang menjadi Guru Penggerak tidak hanya berfokus pada tugasnya secara profesional, tetapi berkesadaran terhadap peran tradisional. Hal tersebut menandakan bahwa perempuan tidak hanya dinilai berharga karena prestasinya secara profesional tetapi juga kesadaran peran tradisional sebagai bagian dari feminism.
- 2) Menguraikan pengalaman Guru Penggerak perempuan dalam implementasi pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang. Tujuan ini menekankan pada bagaimana Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah mengintegrasikan peran tradisional dan profesional melalui pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan perspektif baru bahwa peran tradisional juga merupakan bagian dari perjuangan feminism dan sejarah Indonesia, sebagaimana halnya peran tokoh perempuan yang tampil sebagai pemimpin dan mengangkat senjata.

- 3) Mendeskripsikan tantangan Guru Penggerak perempuan dalam implementasi pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang. Tantangan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Dengan mendeskripsikan tantangan-tantangan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi riil implementasi pedagogi feminis

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1) Teoritis**

Kajian Guru Penggerak dalam penelitian ini untuk mempertegas urgensi pendidikan profesional yang berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan profesionalisme guru Sejarah. Melalui pengembangan profesional tersebut, guru Sejarah dapat memperkuat keterampilan pedagogi sejarah untuk menciptakan praktik pembelajaran Sejarah yang lebih inklusif dan kontekstual. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pembelajaran Sejarah melalui penerapan pendekatan pedagogi feminis, baik dalam membangun relasi kelas yang setara maupun dalam pengembangan materi pembelajaran Sejarah yang berlandaskan pada pendekatan feminism posmodern. Pendekatan ini memungkinkan representasi perempuan dalam sejarah Indonesia dipahami secara lebih holistik serta membuka ruang bagi siswa untuk merefleksikan nilai-nilai feminism berdasarkan pengalaman dan pilihan hidupnya. Siswa tidak hanya mempelajari tokoh-tokoh *great women* dalam buku teks Sejarah, tetapi juga membangun pemahaman sejarah melalui lensa pengalaman perempuan yang lebih beragam dan kontekstual. Melalui upaya ini, siswa belajar menulis dan menafsirkan sejarah sebagaimana perempuan (*writing woman*), menjadikan proses belajar sejarah sebagai ruang pedagogis yang membebaskan, reflektif, dan berperspektif gender.

##### **2) Kebijakan**

Hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum dan perumusan pembelajaran Sejarah inklusif dengan mengakomodasi kontribusi perempuan secara holistik dalam sejarah Indonesia. Selain konstruksi perempuan dalam bidang politik yang selama ini mendominasi

*grand narrative* dan *official history*, perlu pula ditampilkan kontribusi perempuan dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, dan keluarga. Peran tradisional perempuan sering dianggap tidak relevan dengan sejarah justru memiliki makna penting dalam memahami dinamika kehidupan sehari-hari dan pembentukan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan prinsip pedagogi feminis yang mendorong siswa untuk memahami sejarah secara mendalam dan kritis, serta menghargai peran dan kontribusi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari peristiwa dan tokoh besar, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial dan kultural secara lebih adil dan komprehensif, sehingga pembelajaran Sejarah menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

### 3) Praktik

Manfaat penelitian dari segi praktik adalah memberikan perspektif baru dalam pendidikan Sejarah. Pendidikan Sejarah selama ini berfungsi sebagai instrumen politik, penanaman ideologi, sekaligus alat produksi memori kolektif masyarakat yang didominasi oleh tokoh-tokoh besar dan peristiwa politik. Representasi perempuan dalam narasi tersebut sering kali dikonstruksikan melalui sudut pandang androsentrism. Pendekatan ini mendorong guru dan siswa untuk memandang sejarah sebagai ruang dialog dan refleksi atas pengalaman manusia yang beragam, termasuk pengalaman perempuan. Dengan demikian, pembelajaran Sejarah tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan masa lalu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis, empati, dan cara berpikir historis yang berkeadilan gender.

### 4) Isu serta aksi sosial

- a. Guru sejarah yang terlibat dalam program Guru Penggerak dapat mengembangkan keterampilan baru dan wawasan yang lebih luas dalam sejarah, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam pembelajaran Sejarah. Guru Penggerak dapat menjadi model peran positif bagi siswa, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam menjalankan peran tradisional dan profesional serta agen perubahan dalam pendidikan dan masyarakat.

- b. Bagi siswa, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perempuan dalam sejarah, sehingga dapat menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sosial dan sejarah, siswa dapat menjadi lebih berdaya dan termotivasi untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian disertasi ini berfokus pada peranan Guru Penggerak perempuan dalam menerapkan pedagogi feminis pada pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan pada enam Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Palembang dengan subjek penelitian yaitu guru Sejarah perempuan yang tergabung dalam Program Guru Penggerak. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis makna peran perempuan melalui pengalaman Guru Penggerak perempuan mata pelajaran Sejarah, implementasi pedagogi feminis dan tantangan yang dihadapi Guru Penggerak perempuan mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi pengalaman Guru Penggerak perempuan dalam menerapkan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang.

### **1.6. Signifikansi Penelitian & Kontribusi Terhadap Bidang Ilmu**

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memperkuat wacana pedagogi feminis di Indonesia, khususnya dalam pembelajaran Sejarah di tingkat Sekolah Menengah Atas. Selama ini, pembelajaran Sejarah cenderung menonjolkan narasi yang berpusat pada tokoh laki-laki atau perempuan dalam posisi heroik (*great women*), sementara pengalaman perempuan dalam ranah tradisional sering kali terabaikan dalam historiografi maupun pembelajaran Sejarah. Melalui penelitian ini, konstruksi perempuan dihadirkan secara lebih luas dan kontekstual dengan menekankan pengalaman hidup sehari-hari sebagai bagian integral dari pemaknaan sejarah. Selain itu, penelitian ini membangun pemahaman bahwa perempuan bukan lagi sekadar objek yang dituliskan (*written woman*) oleh rasionalitas di luar dirinya (seperti patriarki, kolonialisme, maupun epistemologi

Barat) melainkan subjek yang menuliskan dirinya sendiri (*writing woman*) melalui pengalaman, refleksi, dan praksis pedagogi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perempuan sebagai agen pengetahuan yang aktif dalam menulis dan merekonstruksi sejarahnya sendiri melalui penerapan pedagogi feminis di ruang kelas.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Pendidikan Sejarah dengan mengintegrasikan perspektif pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah. Melalui analisis terhadap peran Guru Penggerak perempuan, penelitian ini memperkaya kajian tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender, kesadaran kritis, dan refleksi historis dapat diterapkan secara konkret dalam proses pembelajaran. Penelitian ini turut memperkuat studi gender dan feminism dalam Pendidikan Sejarah, khususnya melalui pembacaan kontekstual terhadap pengalaman guru perempuan sebagai bentuk praksis feminis yang menghadirkan ruang bagi perempuan untuk menulis, mengartikulasikan, dan mengafirmasi dirinya sebagai subjek sejarah.